

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pangeran Norodom Sihanouk menjadi raja di Kerajaan Kamboja pada 28 Oktober 1941 menggantikan Raja Sisowath Monivong yang mangkat pada 23 April 1941.¹ Pemerintah Perancis yang saat itu sedang menjajah Kamboja lebih menyukai Sihanouk, cicit Sisowath Monivong, dibandingkan Putera Monireth, anak sulung Sisowath Monivong. Hal ini dikarenakan Perancis menilai Putera Monireth yang semenjak tahun 1930 telah memainkan peranan penting dalam Kerajaan Kamboja, lebih cenderung tidak mematuhi peraturan Pemerintah Perancis dan terkenal dengan gagasan mengenai kemerdekaan Kamboja.²

Pemerintah Perancis melihat Sihanouk sebagai sosok yang dapat dikendalikan karena usianya yang masih sangat muda dan sifatnya yang cenderung penurut.³ Untuk mempertahankan kestabilan politik Kamboja sebagai negara jajahan, Perancis lebih memilih Sihanouk sebagai raja selanjutnya. Dengan demikian, Perancis dapat lebih mudah mengendalikan Kamboja dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan Perancis di Kamboja.

Namun predikat mudah dikendalikan hilang ketika akhirnya Sihanouk memperjuangkan kemerdekaan Kamboja. Usaha Sihanouk memperjuangkan kemerdekaan, ia sebut sebagai *Crusade of Independence* ‘peperangan salib untuk kemerdekaan’.⁴ Setelah usahanya menuntut kemerdekaan Kamboja kepada pihak Perancis dan mencari dukungan internasional atas kemerdekaan Kamboja, akhirnya Kamboja pun diberi kemerdekaan oleh Perancis pada 9 November 1953.

Pada tahun 1954, diadakanlah perundingan Jenewa yang mengakhiri perang Indochina I, perang kemerdekaan negara-negara Indochina, dan pemberian

¹ Philippe Devillers. *Sejarah Indo-China Modern*. (terj. Ruhanas Harun). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia. 1998. hlm 46.

² George, Mac Turnan Kahin. *Kerajaan dan Politik Asia Tenggara*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia. 1982. hlm 788.

³ *Ibid.*

⁴ David Joel Stainberg (ed.). *In Search of Southeast Asia: Modern History*. Honolulu: University of Hawaii Press. 1987. hlm 187. Untuk lebih jelasnya mengenai peranan dan usaha Pangeran Norodom Sihanouk dalam memperoleh kemerdekaan Kamboja dari pemerintahan kolonial Perancis lihat juga, Milton Osborne. *Sihanouk: Prince of Light, Prince of Darkness*. Sidney: Allen & Unwin. 1994. hlm 72-82.

status internasional terhadap kemerdekaan Kamboja. Semenjak saat itu, Kamboja pun dipimpin oleh Sihanouk yang dalam pemerintahannya mencoba memperkenalkan demokrasi kepada rakyatnya melalui Sangkum (*Sangkum Reastyr Niyum*).⁵ Namun kekuasaan Sihanouk tidak berlangsung lama karena pada tahun 1970, Perdana Menteri Lon Nol menggulingkan Sihanouk ketika ia sedang melakukan lawatan ke luar negeri. Kudeta Lon Nol ini disebabkan oleh keadaan negara yang semakin berada dalam bahaya karena semakin banyak *infiltrasi* militer Vietnam Utara masuk ke Kamboja.⁶

Untuk mengantisipasi kudeta Lon Nol, Sihanouk mengungsi ke China. Hal ini disebabkan selama Sihanouk berkuasa, China selalu mendukung politik yang dilakukan Sihanouk. Dari Beijing, Sihanouk menuntut pembubaran pemerintahan Lon Nol. Dengan dukungan Beijing, Sihanouk pun membangun koalisi dengan *Communist Party Of Kampuchea* (CPK) 'Partai Komunis Kamboja' untuk membangun pemerintahan koalisi di pengasingan.⁷ Sikap Lon Nol yang cenderung berkiblat ke Amerika dan anti-komunis telah menimbulkan perlawanan dari CPK untuk menentang kekuasaan asing di Kamboja. Sikap antipati Sihanouk dan CPK terhadap pemerintahan Lon Nol dan kekuatan asing merupakan salah satu landasan perjuangan yang menyatukan mereka.

⁵ Sangkum didirikan pada Maret 1955 dan dipimpin sendiri oleh Sihanouk. Sangkum adalah organisasi atau partai yang mengedepankan sosialisme demokrasi sebagai landasannya. Sangkum ini mendominasi perpolitikan Kamboja dari tahun 1955—1970. Lihat Devillers, *Op.Cit.*, hlm 81-83.

⁶ Perjanjian Jenewa 1954 selain memberikan pengukuhan kemerdekaan Kamboja. Perjanjian ini juga telah membagi Vietnam menjadi dua bagian, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan yang ditimbulkan karena perbedaan ideologi antara komunis dan demokrasi. Hal ini pun menimbulkan gejolak di Vietnam dan Indochina pada umumnya. Ini dibuktikan sejak tahun 1960—1975 terjadi perang antara Vietnam Utara melawan Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika (perang Indocina II). Perang ini ternyata telah melibatkan Kamboja untuk masuk ke dalam pertempuran tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian wilayah Kamboja dijadikan basis pertahanan Viekong. Sihanouk pun membiarkan hal ini terjadi sehingga menyebabkan keamanan nasional Kamboja menjadi terganggu. Oleh karena itu, PM Lon Nol yang pro-Amerika melakukan kudeta terhadap Sihanouk untuk menghentikan komunis Vietnam yang masuk teritorial Kamboja. Lihat Devillers, *Ibid.*, hlm 119.

⁷ *Communist Party of Kampuchea* dipimpin oleh Pol Pot, Khieu Samphan, Leng Sary, dan Huo Yuon. Awalnya CPK adalah sebuah partai politik yang bernama *Khmer People's Revolutionary Party* yang merupakan pemisahan dari *Indochinese Communist Party* 'Partai Komunis Indocina'. KPRP ini baru dibentuk pada September 1951. Namun dalam perkembangannya, partai ini kemudian dikenal dengan CPK. Untuk lebih jelasnya lihat Ben Kiernan. "Origins of Khmer Communism". *Southeast Asian Affairs 1981*. hlm. 161-169.

Oleh sebab itu, Sihanouk pada 5 Mei 1970 mendirikan *Front uni National Du Kampuchea* (FUNK)⁸ dan membentuk pemerintahan nasional *Gouvernement Royal d'Union National du Kampuchea* (GRUNK) yang dipimpin oleh Sihanouk.⁹ Namun, perbedaan pemikiran di antara mereka menimbulkan masalah dalam tubuh FUNK. Sihanouk yang berpandangan feodalis dan tradisional tidak disukai CPK, yang anti-monarki. Hal ini membuat CPK bergerak sendiri tanpa melibatkan Sihanouk dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Lon Nol. Setelah melakukan perlawanan selama lima tahun terhadap pasukan Lon Nol, akhirnya pada 17 April 1975 Phnom Penh berhasil dikuasai oleh CPK dari tangan pemerintahan Lon Nol.¹⁰

Setelah mendengar hal tersebut, Sihanouk pun berniat kembali ke Kamboja karena menganggap dirinya telah berhasil memenangkan perjuangan melawan Lon Nol. Ia kembali ke Phnom Penh pada 31 Desember 1975.¹¹ Sementara itu, Khmer Merah¹² pun memproklamirkan pemerintahannya dengan nama *Democratic Kampuchea* (DK) pada 5 Januari 1976.¹³ Tiga bulan setelah pengumuman pemerintahan baru tersebut, Sihanouk mengundurkan diri sebagai kepala negara Kamboja pada 2 April 1976 karena desakan Khmer Merah.¹⁴ Sejak pengunduran diri Sihanouk dari arena politik Kamboja, ia beserta keluarganya dikenakan tahanan rumah. Sihanouk pun tidak tampil dalam kepemimpinan Kamboja selama masa kekuasaan Khmer Merah dan baru tampil kembali dalam panggung politik setelah Kamboja di invasi oleh Vietnam.

Sementara itu, pemerintahan Khmer Merah ini cenderung bersikap memusuhi tetangganya, pemerintahan Vietnam, dan nantinya akan menimbulkan konflik dengan Vietnam. Hal ini dibuktikan, pada 1 Mei 1975, pasukan Khmer Merah langsung menyerang daerah-daerah Vietnam yang berbatasan dengan

⁸Tujuan didirikannya FUNK atau Barisan Kebangsaan Bersatu Kamboja adalah untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Kamboja serta mempertahankan kerajaan Kamboja. Lihat Devilers, *Op.Cit.*, hlm 122.

⁹Ross Russel R. (ed.). *Cambodia a Country Study*. Washington: Federal Result Library Division of Congres. 1990. hlm 43.

¹⁰David Chandler. *A History of Cambodia, Second Edition*. Colorado: Westview Press Inc.1996.hlm 208.

¹¹Milton Osborne, *Op.Cit.*, hlm 231.

¹²Pada perkembangannya, Sihanouk menyebut CPK sebagai Khmer Merah (*Khmer Rouge*, bahasa Perancis) karena CPK adalah organisasi Komunis Kamboja.

¹³Untuk lebih jelasnya lihat *Ibid.*, hlm 228-243.

¹⁴*Ibid.*

Kamboja, yaitu dari daerah Ha Tien sampai Tay Ninh.¹⁵ Kemudian pada tanggal 4 dan 10 Mei 1975 pasukan Khmer Merah juga menduduki wilayah Vietnam, yakni Pulau Phu Quoc dan Pulau Tho Chu.¹⁶

Penyerangan-penyerangan pasukan Khmer Merah ke beberapa wilayah perbatasan Vietnam—Kamboja maupun wilayah Vietnam sendiri dipicu oleh beberapa sebab. Sebab utama adalah faktor sejarah. Hal ini disebabkan pemerintahan *Democratic Kampuchea* (DK) menginginkan kembalinya wilayah Kamboja yang telah dikusai oleh Vietnam selama dua abad silam.¹⁷ Perbedaan persepsi mengenai garis *brevile*, garis perbatasan yang telah ditentukan Perancis pada tahun 1939, menjadi akar masalah dalam konflik antara Khmer Merah dengan Vietnam.

Penyerangan-penyerangan Kamboja, Khmer Merah, ke Vietnam telah membuat pemerintahan kedua negara mengalami ketegangan. Untuk mengatasi masalah ini, kedua pemerintahan ini bertemu pada tahun 1975 dan 1976 dalam beberapa perundingan untuk mendiskusikan masalah perbatasan Kamboja—Vietnam. Namun, perundingan damai ini tidak berjalan dengan baik. Akibat ketegangan yang semakin meningkat dan pembicaraan damai yang tidak berujung penyelesaian, maka pada akhir tahun 1977 Pemerintahan DK memutuskan hubungan diplomatik dengan Vietnam.¹⁸

Sebab yang kedua, yakni rezim Khmer Merah tidak menyukai Vietnam sebagai patron komunisnya. Pemimpin-pemimpin partai komunis Kamboja lebih menyukai pemikiran komunis Cina yang berdasarkan ideologi Mao Zedong.¹⁹ Bagi Kamboja, Cina adalah partner dalam menghadapi hegemoni Vietnam.

¹⁵ Hoang Nguyen. *The Vietnam-Kampuchea Conflict (A Historical Record)*. Hanoi: Foreign Language Publishing House. 1979. hlm.19.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Antara tahun 1870 dan 1914, pemerintah kolonial Perancis telah menentukan kembali batas-batas wilayah antara Vietnam dan Kamboja, dan ternyata pemerintahan kolonial Perancis memasukkan sebagian wilayah Kamboja menjadi sebagian wilayah administratif Vietnam. Lihat Stephen J. Morris. *Why Vietnam Invaded Cambodia?*. California: Stanford University Press. 1999. hlm 91.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 102.

¹⁹ Para pemimpin Khmer Merah tertarik dengan pemikiran-pemikiran Mao Zedong terutama dengan gagasan revolusi kebudayaannya. Mereka pun menerapkan evakuasi penduduk dari kota ke desa, pelarangan agama, pengakuan individu, militer yang kuat, sebagai aplikasi dari ideologi Mao Zedong. Pemimpin Khmer Merah percaya dapat membangun negaranya dengan cepat bila melaksanakan revolusi total di segala bidang yang berlandaskan pada kekuatan sendiri (*self-reliance*). Lihat Morris, *Op.Cit.*, hlm.71-84.

Kamboja menghindari dominasi Vietnam yang sudah pernah terjadi pada saat menjadi *Indochinese Communist Party* ‘partai komunis Indocina’.²⁰

Sebab ketiga, selain masalah perbatasan dan ketidaksukaan Khmer Merah terhadap dominasi komunis Vietnam, penyebab timbulnya konflik Kamboja—Vietnam juga dipicu oleh keretakan dalam kubu Khmer Merahnya sendiri. Diawal kekuasaan rezim Khmer Merah, partai ini membagi wilayah otoritasnya menjadi tujuh zona.²¹ Namun, ternyata pembagian zona ini menyebabkan ketidaksamaan visi di antara pemimpin zona dalam pemerintahan Pol Pot.

Adanya perbedaan pandangan antara zona timur dan zona lainnya mengenai penerapan revolusi di Kamboja, telah mendorong Pol Pot menyerang dan membunuh semua pemimpin wilayah Timur pada tahun 1978. Pemimpin zona timur yang berhasil lolos lalu melarikan diri ke Vietnam adalah Heng Samrin dan Pen Sovan. Mereka kemudian membentuk *National Union Front the Salvation of Kampuchea* (NUFSK) ‘Front Persatuan Nasional Penyelamatan Kampuchea’ pada 3 Desember 1978.²² NUFSK ini didirikan dengan tujuan menjatuhkan rezim diktator Pol Pot.

Di samping itu, perlakuan rezim Pol Pot yang semena-mena terhadap sekitar 50.000 keturunan Vietnam di Kamboja telah memancing perhatian serius pemerintah Vietnam.²³ Karena faktor-faktor diatas, pada 25 Desember 1978, pemerintahan sosialis Vietnam menyerang Kamboja dengan kekuatan militer yang ofensif.²⁴ Setelah pertempuran yang tidak seimbang antara pasukan Vietnam dengan pasukan militer Khmer Merah, Phnom Penh, ibu kota Kamboja, jatuh dan dapat dikuasai oleh pasukan Vietnam pada 7 Januari 1979.²⁵ Pada 12 Januari 1979, kelompok yang pro-Vietnam ini, Heng Samrin mendirikan pemerintahan

²⁰ *Indochinese Communist Party* (ICP) didirikan oleh Ho Chi Minh pada 1930. Pada awalnya tujuan ICP adalah mempersatukan elemen Indocina untuk lepas dari kolonialisme Perancis dan mendirikan Negara federasi Indocina. Pada tahun 1930—1950, ICP memegang kontrol atas komunis Kamboja dan Laos. Pada 1951, ICP memutuskan untuk melakukan pemisahan partai menjadi 3 partai komunis (Vietnam, Kamboja, dan Laos). Lihat Kiernan, *Op.Cit.*

²¹ Ross Russel, *Op.Cit.*, hlm. 61.

²² Nguyen, *Op.Cit.*, hlm 34.

²³ Nazaruddin Nasution dkk. *Pasang Surut Hubungan Diplomasi Indonesia Kamboja*. Phnom Penh: Kedutaan Besar Republik Indonesia. 2002. hlm.96.

²⁴ Muchtar E. Harahap dan M.Arbiyanto. *Konflik Damai Kampuchea*. Jakarta: NSEAS dan FOGMA. 1990. hlm. 12.

²⁵ Justus M. Der Kroef.” Cambodia: From Democratic Kampuchea” to “People’s Republic”. *Asian Survey*, Volume XIX, No 8, August 1979. California: University of California. hlm 733.

yang disebut *People's Republic of Kampuchea* (PRK) 'Republik Rakyat Kamboja'.²⁶

Invasi Vietnam ke Kamboja telah mengundang perhatian dunia internasional. Sebagian besar negara mengkritik tindakan Vietnam yang telah melakukan intervensi dalam pergantian tampuk pemerintahan di Kamboja. Reaksi-reaksi dan kritikan keras pun dilontarkan oleh ASEAN²⁷, China, dan Amerika Serikat ke arah Vietnam karena telah menginvasi Kamboja yang merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Kamboja. Namun, dalam hal ini, Uni Soviet dan negara-negara blok timur mendukung invasi Vietnam atas Kamboja.

Di dalam negeri Kamboja sendiri, muncul kelompok-kelompok perlawanan yang menentang pemerintahan Heng Samrin di antaranya adalah Khmer Merah. Dengan sisa-sisa pasukannya, Khmer Merah masih melakukan perlawanan terhadap pasukan pemerintahan Heng Samrin di sepanjang perbatasan Kamboja—Thailand. Kelompok kedua adalah *the Khmer People's National Liberation Front* (KPNLF). KPNLF adalah pergerakan non-komunis Kamboja yang diproklamasikan di barat daya Kamboja pada 9 Oktober 1979.²⁸ Pemimpin dan pendiri dari organisasi ini adalah Son Sann.

Kelompok ketiga yang menentang rezim Heng Samrin adalah komunitas pendukung Pangeran Sihanouk yang dikenal dengan sebutan Moulinaka, yakni *Mouvement pour la Liberation Nationale du Kampuchea*, yang didirikan oleh Kong Sileah pada Agustus 1979. Pada Maret 1981, Sihanouk mendirikan partai politiknya yang bernama FUNCIPPEC, yakni *Front Uni National pour un Cambodge Independent, Neutre, Pacifique, et Cooperatif* untuk melandasi perjuangan diplomasinya.²⁹ Kemudian Moulinaka bergabung ke dalam partai ini sebagai sayap militer FUNCIPPEC.

Dengan adanya pemerintahan baru Kamboja yang pro-Vietnam (PRK), kursi pemerintahan DK dalam keanggotaan PBB pun terancam terambil alih oleh

²⁶ Michael Vikery. *Kampuchea: Politics, Economics, and Society*. Sidney: Allen & Unwin.1986. hlm 43

²⁷ ASEAN (*Association of Southeast Asian Nation*) merupakan wadah politik regional negara-negara Asia Tenggara didirikan pada 8 Agustus 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina yang telah menandatangani Deklarasi Bangkok.

²⁸ Ross Russel, *Op.Cit.* hlm 194.

²⁹ Jacques Bekaert. "Kampuchea The Year of The Nationalist" dalam *Southeast Asian Affairs*. Pasir Panjang: ISEAS. 1983. hlm. 170.

pemerintahan baru tersebut. Posisi DK pun tidak menguntungkan karena *image* buruk Khmer Merah yang telah melakukan pembunuhan besar-besaran rakyat Kamboja semakin mempersulit posisi DK dalam mempertahankan kursi di PBB. Untuk mengatasi hal tersebut, Pangeran Norodom Sihanouk yang telah diungsikan dari Phnom Penh ke Beijing, setelah Vietnam menguasai Phnom Penh, diminta langsung oleh Pol Pot agar mengambil alih kepemimpinan pemerintahan tersebut di PBB dengan mempresentasikan masalah-masalah Kamboja di Majelis Umum PBB.³⁰

Awalnya, Sihanouk tidak mau mewakili Khmer Merah karena sulit baginya untuk mewakili mereka yang telah menjadikannya tahanan rumah dan juga telah banyak membunuh keluarganya serta masyarakat Kamboja. Namun, karena Sihanouk sangat menghormati China yang sudah banyak membantunya dan merupakan pendukung utama Khmer Merah, ia pun akhirnya setuju untuk mewakili Kamboja di depan sidang PBB. Presentasi yang dilakukan Sihanouk pada Januari 1979, membuat kursi pemerintahan *Democratic Kampuchea* aman dari pengambilalihan pemerintahan Heng Samrin dan secara tidak langsung menjadikan Sihanouk sebagai tokoh perwakilan Kamboja yang diakui oleh PBB dan ASEAN.³¹

Kemudian untuk mengatasi konflik Kamboja dan mempertahankan kursi Kamboja di PBB, China dan ASEAN mengusulkan untuk membentuk front koalisi yang terdiri dari tiga kelompok penentang rezim Heng Samrin.³² KPNLF dan Khmer Merah, memang semula enggan berkoalisi, tetapi pada akhirnya mereka menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam front koalisi pemerintahan ini. Dalam hal ini, Sihanouk mempunyai andil besar dalam mempersatukan dua elemen politik yang berbeda antara Khmer Merah dan KPNLF. Pendekatan dan dialog yang dilakukan Sihanouk dengan Khieu Samphan maupun Son Sann telah membuat kedua faksi ini akhirnya mau bekerja sama dan menyingkirkan segala perbedaan yang ada.

Walaupun banyak perbedaan mengenai cita-cita, tujuan dan prinsip di antara ketiga faksi ini (Khmer Merah, FUNCIPPEC, KPNLF), tetapi mereka

³⁰ Ross Russel, *Op.Cit.*, hlm 196.

³¹ *Ibid.*, hlm 192.

³² *Ibid.*, hlm.196.

mempunyai satu visi yang sama mengenai kondisi Kamboja Saat itu. Kesamaan visi di antara ketiga faksi penentang rezim Heng Samrin adalah membangun dan mendirikan pemerintahan koalisi bersama yang bertujuan untuk mengusir Vietnam dari Kamboja serta menjatuhkan pemerintahan Heng Samrin. Dengan adanya pemerintahan bersama, usaha perlawanan akan lebih efektif dan lebih terkoordinasi. Selain itu, pembentukan pemerintahan koalisi ini bermaksud mengamankan kursi *Democratic Kampuchea* di PBB dari pengambilalihan oleh PRK.

Pada akhirnya 22 Juni 1982, *Coalition Government of Democratic Kmpuchea* (CGDK) ‘pemerintahan koalisi demokrasi Kamboja’ telah terbentuk dengan penggabungan tiga partai.³³ Pemerintahan koalisi demokrasi Kamboja akan dipimpin oleh Sihanouk sebagai presidennya, Son Sann sebagai perdana menterinya, dan Khieu Samphan sebagai wakil presiden yang mengatur politik luar negeri pemerintahan demokrasi Kamboja. Pemerintahan koalisi bersama ini diharapkan, dapat membantu tercapainya konsolidasi dan rekonsiliasi damai di Kamboja. Pembentukan pemerintahan koalisi demokrasi Kamboja, dengan Sihanouk sebagai pemimpinnya diakui oleh ASEAN, Cina, dan didukung oleh negara-negara barat seperti Amerika dan PBB.³⁴

Salah satu faktor penting dari uraian di atas terlihat bahwa proses perdamaian Kamboja tidak terlepas dari peranan Pangeran Norodom Sihanouk. Dari awal, ia mempresentasikan masalah Kamboja di Dewan Keamanan PBB hingga proses pembentukan CGDK. Dengan tampilnya Sihanouk di PBB, ia pun diharapkan sebagai tokoh yang dapat membawa perdamaian dalam konflik Kamboja. Ia merupakan tokoh nasional Kamboja yang diakui dunia internasional karena dianggap dapat mengakomodasi dan mempersatukan elemen-elemen politik yang berbeda di Kamboja, terbukti dengan berhasilnya pembentukan CGDK.

Pangeran Norodom Sihanouk dinilai sebagai sosok yang kompromistis terhadap lawan-lawan politiknya dan juga dihormati oleh rakyat Kamboja. Karena jasanya terhadap negara, ia pun diakui oleh masyarakat internasional. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Pangeran Norodom memegang peran penting di

³³ Ross Russel, *Op.Cit.*, hlm 201.

³⁴ Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 99.

tubuh CGDK sebab dia-lah satu-satunya tokoh damai Kamboja yang dapat diterima semua pihak, baik oleh ASEAN, Vietnam, China, Uni Soviet maupun PBB.

Peranan Sihanouk dalam proses damai Kamboja dapat dinilai berhasil dibuktikan dengan terbentuknya pemerintahan koalisi ini. Selain itu, ia juga berperan dalam penyelesaian konflik Kamboja di meja perundingan, baik pada tingkat regional maupun tingkat internasional. Perundingan tersebut menjadi lebih terbuka sebab sosok Sihanouk yang telah dikenal oleh pihak-pihak yang bertikai dalam konflik Kamboja. Hal ini menjadi penting karena dengan adanya sosoknya, telah membuat Vietnam dan rezim Heng Samrin akhirnya mau berunding dengan Sihanouk yang tergabung dalam CGDK.

Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan membahas proses rekonsiliasi damai Kamboja 1982—1991. Dalam proses tersebut juga akan dijabarkan mengenai peranan Pangeran Norodom Sihanouk sebagai Presiden CGDK dalam perundingan damai Kamboja baik regional maupun internasional dari tahun 1982 sampai Perjanjian Paris 1991. Sihanouk adalah tokoh kunci perdamaian kamboja sebab ia adalah tokoh nasional Kamboja yang diakui dan dihormati semua pihak yang terlibat dalam konflik Kamboja.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai proses rekonsiliasi damai Kamboja 1982-1991. Di dalam proses tersebut munculah Sihanouk yang diharapkan dapat membawa perdamaian di Kamboja karena sosoknya yang telah dikenal oleh dunia internasional. Untuk membahas masalah di atas, berbagai pertanyaan penelitian perlu diajukan: Faktor apa yang melatarbelakangi keterlibatan Pangeran Norodom Sihanouk dalam CGDK; Bagaimana peranan Pangeran Norodom Sihanouk dalam proses pembentukan CGDK dan melihat reaksi-reaksi internasional atas pembentukan CGDK; Bagaimana Proses rekonsiliasi Kamboja dari tahun 1982 sampai 1991 dan melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh Pangeran Norodom Sihanouk dalam proses damai tersebut.

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup dalam penelitian ini mengambil kurun waktu dari tahun 1982 hingga tahun 1991. Pada tahun 1982, digunakan sebagai awal pembahasan karena pada tahun itu adalah awal berdirinya pemerintahan koalisi demokrasi Kamboja, yang merupakan gabungan antara tiga kelompok faksi, Khmer Merah, FUNCIPPEC, dan KPNLF, yang menentang rezim Heng Samrin-Hun Sen. Tahun 1991 dipilih sebagai akhir pembahasan karena pada tahun tersebut telah ditandatangani Perjanjian Paris yang merupakan titik terang bagi penyelesaian politik konflik Kamboja. Dengan adanya perjanjian ini, maka dimulailah era baru Kamboja di bawah pengawasan PBB.

Proses rekonsiliasi damai Kamboja yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai usaha-usaha perdamaian yang dilakukan untuk mencapai rekonsiliasi politik Kamboja dari tahun 1982 hingga 1991. Dalam proses tersebut munculah Pangeran Norodom Sihanouk sebagai pemersatu faksi-faksi Kamboja yang bertikai. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan menjelaskan peranan dan usaha-usaha yang dilakukan Sihanouk untuk mencapai perdamaian di Kamboja.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai proses rekonsiliasi damai Kamboja 1982—1991. Penelitian ini menjadi khusus karena penulis menjabarkan proses rekonsiliasi Kamboja dari tahun 1982 hingga 1991, baik pada perundingan regional maupun dalam kancah internasional secara lengkap dan kronologis. Selain itu, penelitian ini dilengkapi adanya perjanjian Paris 1991 yang mengakhiri pertentangan antara faksi di Kamboja, yang merupakan awal proses damai di antara faksi-faksi di bawah pengawasan PBB.

Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan tambahan informasi mengenai pentingnya peranan Pangeran Norodom Sihanouk dalam pemerintahan koalisi demokrasi Kamboja pada rekonsiliasi damai Kamboja guna mencapai rekonsiliasi politik konflik Kamboja. Tidak dapat dipungkiri bahwa

sosoknya dapat mempersatukan elemen-elemen politik yang berbeda sehingga damai Kamboja dapat terwujud.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan terlebih dahulu menentukan subjek yang akan diteliti. Setelah itu, penulis akan menentukan sumber-sumber yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

Sumber-sumber yang relevan diperoleh dari Perpustakaan Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) dan Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (UI) Depok. Selain itu, Perpustakaan *Centre For Strategic and International Studies* (CSIS) dan Perpustakaan LIPI serta Perpustakaan ASEAN dan Perpustakaan Nasional Indonesia. Sumber tersebut kemudian dikelompokkan menurut jenisnya ke dalam sumber primer dan sekunder yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini.

Tahapan berikutnya dalam penelitian ini adalah kritik yang terdiri dari kritik ekstren dan intern. penulis melakukan kritik intern dengan membandingkan antara bahan yang satu dengan yang lain untuk melihat kredibilitasnya, terutama jika ada pertentangan antara penulisan yang satu dengan yang lain. Sumber yang diperoleh penulis sudah berbentuk teks. Oleh karena itu, kritik ekstern pun sulit untuk dilakukan. Sehingga kritik yang dapat dilakukan hanyalah kritik intern.

Tahap penelitian selanjutnya adalah interpretasi atau penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh. Dalam tahap ini, penilaian secara subjektif sedapat mungkin dihindarkan dan diusahakan untuk bersikap objektif. Oleh karena itu, penulis harus berhati-hati dengan sumber yang ditulis dalam buku tertentu yang mempunyai subjektifitas.

Tahap terakhir dari penelitian ini adalah historiografi. Tahap ini merupakan rekonstruksi peristiwa yang akan dilakukan penulis dengan cara merumuskan peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui tiga tahapan sebelumnya. Hal yang perlu dihindari dalam tahap ini adalah jangan sampai terbawa ke dalam arus penulisan yang telah ada sehingga merupakan

pengulangan dari penulisan yang telah ada sebelumnya mengenai tema yang sama.

1.6 Tinjauan Historiografi

Tulisan mengenai konflik Kamboja bukanlah merupakan hal yang baru. Sudah terdapat beberapa buku yang mengupas tema ini. Namun, sejauh pengamatan penulis belum ada buku yang membahas secara lengkap mengenai proses rekonsiliasi Kamboja dan dilengkapi dengan peranan Sihanouk di dalam proses tersebut.

Buku mengenai penyelesaian damai konflik Kamboja yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah karangan Sorpong Peou, *Conflict Neutralization in the Cambodia War from Battlefield to Ballot Box*. Buku ini berisi tentang proses damai Kamboja khususnya mengenai jalannya perundingan-perundingan damai Kamboja. Namun, dalam hal peranan Sihanouk, buku ini masih belum banyak memberikan informasi mengenai peran konkrit Sihanouk dalam proses damai dan perundingan-perundingan tersebut. Buku kedua yang kurang lebih sama menjabarkan proses perdamaian Kamboja dari tahun 1979—1991 ialah buku karangan Macalister Brown dan Joseph J. Zascoff, *Cambodia Confronts the peace makers 1979—1991*.

Untuk menambah dan melengkapi informasi akan peranan Sihanouk dalam penyelesaian konflik Kamboja penulis menggunakan buku *Moment of truth, Prince Sihanouk Position on Negotiations For a Lasting Peace in Cambodia*. Dalam buku tersebut berisi tentang proposal-proposal yang diajukan Sihanouk untuk mengakhiri konflik Kamboja. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian terhadap koran-koran Indonesia dari tahun 1979—1988 yang memuat berita mengenai konflik Kamboja. Dikarenakan terbatasnya waktu penelitian, penulis hanya meneliti surat kabar yang memuat berita mengenai proses damai Kamboja tanpa melakukan perbandingan dengan koran-koran Indonesia yang lain pada tanggal dan berita yang sama.

Hal ini tidak dilakukan karena karena penulis hanya meneliti surat kabar yang memuat berita yang telah disampaikan oleh kantor-kantor berita asing seperti *Xinhua* (China), AFP (Perancis), dll. Koran-koran yang digunakan dalam

penelitian ini ialah *Antara, Jurnal Ekuin, Kompas, Merdeka, Sinar harapan, dan Suara Karya*, dari berbagai edisi dan tahun.

1.7 Sumber Penelitian

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah kumpulan dokumen mengenai konflik Kamboja 1979—1985 yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Thailand, dengan judul *Documents of The Kampuchean Problems 1979-1985*. Sumber ini disebut primer karena dalam buku ini hanya berisikan naskah-naskah mengenai konflik Kamboja tanpa proses edit dan revisi. Buku ini berisikan naskah-naskah mengenai konflik Kamboja seperti naskah pembentukan *Coalition Government of Democratic Kampuchea* (CGDK) yang antara lain memuat tujuan, prinsip-prinsip, dan komposisi CGDK.

Penulis menemukan dokumen ini di Perpustakaan CSIS. Untuk sumber-sumber sekunder, penulis menggunakan buku-buku teks dan berbagai jurnal. Sumber-sumber tersebut penulis peroleh dari beberapa perpustakaan yang telah dikunjungi, antara lain Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) dan Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (UI) Depok, Perpustakaan *Centre For Strategic and International Studies* (CSIS) yang terletak di jalan Tanah Abang III, No. 23-27, Jakarta dan perpustakaan LIPI yang terletak di Jalan Gatot Subroto serta Perpustakaan Nasional Indonesia di Jalan Salemba Raya.

Salah satu sumber yang digunakan adalah buku karangan Ross Russel R yang berjudul *Cambodia a Country Study* yang diperoleh dari Perpustakaan CSIS. Buku ini membahas mengenai sejarah Kamboja dari masa awal kerajaan, kemerdekaan hingga invasi Vietnam atas Kamboja yang membawa Kamboja terjebak dalam konflik saudara.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan mengenai proses rekonsiliasi damai Kamboja 1982—1991 akan dibagi dalam lima bab pembahasan. Susunan bab-bab ini akan dimulai dari pembahasan mengenai sejarah awal Kamboja, latar belakang invasi Vietnam,

terjadinya pembentukan pemerintahan koalisi, dan Perjanjian Paris yang merupakan titik terang damai di Kamboja.

Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah yang akan diteliti, ruang lingkup permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian sumber-sumber yang menjadi acuan serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

Pada Bab 2, penulis akan membahas mengenai keadaan Kamboja sebelum invasi Vietnam, faktor-faktor yang melatarbelakangi invasi Vietnam ke Kamboja, serta dampak invasi tersebut terhadap perpolitikan di Kamboja, dan reaksi internasional atas invansi Vietnam.

Pada Bab 3, penulis akan membahas mengenai latar belakang pembentukan pemerintahan koalisi dan proses pembentukan pemerintahan koalisi demokrasi Kamboja, tujuan, cita-cita dan komposisi pemerintahan koalisi tersebut, serta menggambarkan reaksi pemerintahan Heng Samrin dan dunia internasional atas pembentukan pemerintahan koalisi.

Pada Bab 4, penulis akan membahas usaha-usaha yang dilakukan Sihanouk dalam perundingan-perundingan damai Kamboja dari tahun 1982—1991.

Pada Bab 5, penulis akan menyimpulkan pembahasan bab-bab sebelumnya.